

BAB 4

METODOLOGI PENELITIAN PENGUKURAN EVALUASI

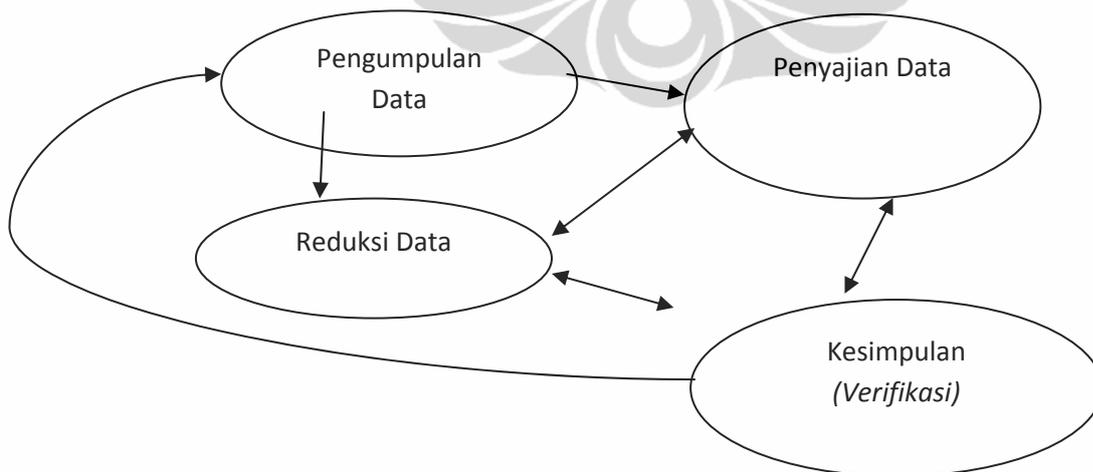
4.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dalam mengevaluasi proses pelaksanaan program dana penguatan modal (DPM) APBN TA 2006 di Kota Metro sehingga untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tersebut maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena penulis ingin mengetahui perasaan, keinginan dan permasalahan yang terjadi dari informan tentang proses pelaksanaan program dana penguatan modal yang tidak dapat diperoleh melalui pendekatan rasionalitas.

Menurut Guba dan Lincon (1981 : 23) menyebutkan bahwa pendekatan ilmiah hanya menjelaskan pengetahuan proposional saja.

4.2. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Hubberman (1992:16) yaitu menggunakan analisis model interaktif dengan prosedur yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan (*verifikasi*)



Sumber : Miles & Huberman (1999:20)

Gambar 1. Komponen – komponen Analisis Data Model Interaktif

A. *Reduksi Data*

Reduksi data dimaksudkan sebagai proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan – catatan tertulis di lapangan terkait proses pelaksanaan program dana penguatan modal bagi pembudidaya ikan di Kota Metro.

Data yang diperoleh di lokasi penelitian di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mengenai data produksi budidaya setelah mendapatkan pinjaman dana penguatan modal. Pada Dinas Pertanian Metro penulis memperoleh data hasil identifikasi pelaksanaan program dana penguatan modal berupa jumlah produksi dan pembudidaya ikan penerima dana penguatan modal. Pada UPP Kota Metro penulis mendapatkan data pinjaman dan pengembalian dana penguatan modal

B. *Penyajian Data*

Penyajian data dimaksudkan sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan terkait dengan proses pelaksanaan program dana penguatan modal di Kota Metro (Ely.T.D, 2007:65).

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tabel, gambar dan kumpulan kalimat yang tersusun dalam bentuk yang padu sehingga penulis dapat melihat apa yang terjadi dan menarik kesimpulan dengan tepat.

C. *Menarik Kesimpulan (Verifikasi)*

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah merupakan kegiatan pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisis selama penulis mencatat atau peninjauan ulang kembali (Ely.T.D, 2007:66). Verifikasi data yang dilakukan oleh penulis pada saat memperoleh data produksi budidaya dari sekretariat dinas kelautan dan perikanan provinsi Lampung, data tersebut oleh penulis dikonfirmasikan lagi kepada Kasi Statistik Budidaya, hal sama juga dilakukan oleh penulis terhadap data yang didapatkan di dinas pertanian Metro dan UPP Kota Metro.

4.3. Keabsahan Data

Menurut Moleong (2004:324) untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu :

1. Derajat Kepercayaan (*credibility*)

Konsep ini menggantikan validitas internal dari non kualitatif yang berfungsi untuk melaksanakan penyelidikan sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat tercapai dan untuk memeriksa kredibilitas data dilakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Perpanjangan waktu di lapangan yaitu penulis mempunyai cukup waktu untuk mengadakan hubungan baik dengan obyek penelitian
- b. Pengamatan secara intensif yaitu penulis dapat melakukan pengamatan terhadap usaha budidaya ikan yang diusahakan oleh pembudidaya penerima dana penguatan modal di Kota Metro
- c. Triangulasi yaitu mengecek kembali hasil observasi dan wawancara
- d. Peer debriefing, yaitu hasil penelitian penulis diskusikan dengan dosen pembimbing guna memperoleh kritikan yang dapat meningkatkan keberhasilan penelitian
- e. Mengadakan member check, yaitu penulis mengadakan kontak terhadap informan penelitian untuk menanyakan ulang kebenaran data yang telah terkumpul serta mengumpulkan data yang dirasakan kurang

2. Keteralihan (*transferability*)

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima, dalam penelitian ini penulis berusaha memberikan deskripsi yang terinci tentang bagaimana hasil penelitian yang dicapai dan hal ini bergantung kepada penilaian dari pembaca.

3. Kebergantungan (*dependability*)

Kebergantungan menurut istilah konvensional disebut dengan realibilitas dan merupakan syarat bagi validitas di mana dengan alat yang reliabel maka akan diperoleh data yang valid dan dalam penelitian kualitatif yang digunakan oleh penulis ini alat utama adalah penulis sendiri.

4. Kepastian (*confirmability*)

Kriteria kepastian berasal dari konsep obyektivitas menurut peneliti yang non kualitatif di mana sesuatu itu obyektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat dan penemuan seseorang.

4.4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif mengakui adanya dua jenis data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif (Sutopo, 2002 : 116) sehingga dengan demikian dalam penelitian ini sumber data yang digunakan berasal dari dua jenis data tersebut dan dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Data Kualitatif

Menurut Moleong (2004 : 157) dikatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata – kata dan tindakan dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain – lain, dengan demikian sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Informan

Informan adalah orang yang dianggap mengetahui benar fenomena yang menjadi obyek penelitian sehingga dapat membantu penulis dalam menggali informasi dan data yang dibutuhkan dalam pendekatan kualitatif dengan demikian informan dapat dipilih secara purposive (sengaja) sampling yaitu ditentukan sendiri oleh penulis sesuai dengan tujuan penelitian (Moleong, 2004 : 157).

Dengan demikian, informan awal yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kabid Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Kabid Perikanan Dinas Pertanian Metro, Kancab BRI Metro serta Ketua UPP Kota Metro beserta pengurus UPP guna mengetahui proses pelaksanaan program dana penguatan modal dan selanjutnya adalah pembudidaya ikan penerima program dana penguatan modal sebagai cross check mengenai proses pelaksanaan dan pemanfaatan dana penguatan modal ini.

Sehingga pada akhir penelitian akan didapatkan hasil gambaran secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program dana penguatan modal bagi pembudidaya ikan skala kecil di Kota Metro.

2. Dokumen

Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkenaan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu (Moleong, 2004 : 157) untuk penelitian ini dokumen yang digunakan oleh penulis berupa gambar yaitu foto – foto kolam pembudidaya, serta dokumen resmi lainnya seperti SK Walikota tentang Pembentukan UPP Kota Metro, SK Perjanjian Kerjasama antara UPP, Mitra dan BRI.

B. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah jenis data yang berkaitan dengan jumlah dan biasanya dalam bentuk terukur (Moleong, 2004 : 157). Adapun sumber data yang berasal dari data kuantitatif ini adalah data statistik budidaya dinas kelautan dan perikanan provinsi di mana data ini diinterpretasikan dari sisi makna yang terkandung di dalamnya bukan dari sisi numeriknya, data pinjaman dan pengembalian dana penguatan modal serta data perkembangan pembudidaya di Kota Metro.

4.5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

- Wawancara secara mendalam

Yaitu penulis mengadakan tanya jawab langsung kepada informan dalam penelitian ini yaitu : Kabid Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Kabid Perikanan Dinas Pertanian Metro, Kancab BRI Metro serta Ketua UPP Kota Metro beserta pengurus UPP dan Pembudidaya ikan penerima dana penguatan modal (DPM). Menurut Sutopo dalam Ely (2007 : 35) menyatakan bahwa teknik wawancara yang digunakan bersifat tidak terstruktur dan mendalam, hal ini dikarenakan penulis merasa tidak tahu apa yang diketahuinya. Wawancara yang

dilakukan oleh penulis adalah mengarahkan pertanyaan untuk menggali informasi secara mendalam dan tidak dilakukan secara formal terstruktur sehingga didapatkan pandangan subyek yang diteliti tentang proses pelaksanaan program dana penguatan modal di Kota Metro.

- Observasi Lapangan

Teknik observasi yang digunakan adalah dengan mendatangi langsung lokasi penelitian yang bertujuan untuk melihat langsung keadaan lapangan dan implementasi dari pelaksanaan program dana penguatan modal bagi pembudidaya ikan skala kecil serta untuk melengkapi dan menguji hasil wawancara yang diberikan oleh informan awal sehingga mampu menggambarkan segala macam situasi yang sebenarnya terjadi.

- Dokumentasi

Untuk melengkapi data hasil wawancara penulis juga menggunakan teknik dokumentasi yang bertujuan untuk mendapatkan data sekunder berupa surat – surat keputusan, arsip, foto dan laporan – laporan. Metode dokumentasi adalah mencari data dengan bersumber pada benda - benda yang tertulis yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, notulen rapat, peraturan dan sebagainya (Arikunto, 2006:158).

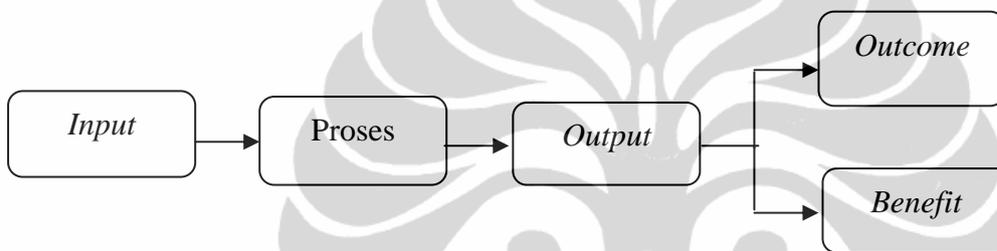
Dokumentasi yang dilakukan oleh penulis dengan cara mencatat dan mengkopi dokumen – dokumen yang diperlukan antara lain : SK Walikota tentang pembentukan UPP Kota Metro, Profile UPP Kota Metro, serta dokumen – dokumen lainnya yang akan mendukung data penelitian penulis.

BAB 5

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Sistem Evaluasi Program

Sistem memiliki dua arti, yaitu sistem sebagai cara atau metode dan sistem sebagai unsur-unsur gabungan yang membangun satu kesatuan yang utuh. Dalam perencanaan program, sistem dapat dipandang dalam perspektif cara/metode yang merupakan suatu metode untuk menyusun program-program tersebut, yaitu menggunakan pendekatan input-output, seperti digambarkan berikut ini.



Sumber : Murwani (1999 : 20)

Gambar 2. Skematik Sistem Sebagai Suatu Proses

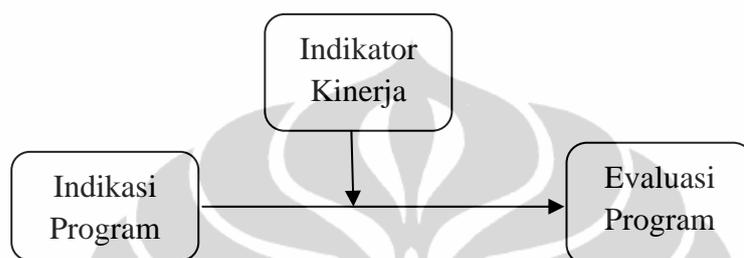
Input didefinisikan sebagai semua sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan output program yaitu tergantung pada programnya, input program dapat mencakup: dana, waktu, sumber daya manusia, material, peralatan, teknologi, jasa kontraktor, jasa konsultan, dan sebagainya.

Proses atau aktivitas didefinisikan sebagai kegiatan, atau rangkaian, atau kelompok kegiatan, atau proses yang dilakukan untuk mentransformasikan input program menjadi *output* program. *Output* didefinisikan sebagai barang atau jasa (produk atau pelayanan) yang dihasilkan (diwujudkan) karena adanya aktivitas-aktivitas program. *Outcome* didefinisikan sebagai barang atau jasa yang dihasilkan (diwujudkan) karena adanya atau berfungsinya output program. *Benefit* atau manfaat didefinisikan sebagai perubahan nilai, kondisi, atau status kehidupan masyarakat yang disebabkan karena adanya suatu program.

Unsur-unsur pembentuk input menjadi alat dalam melakukan proses penyusunan indikator kinerja, dimana indikator tersebut akan dipergunakan dalam

sistem evaluasi program berbasis kinerja atau untuk mengevaluasi program yang telah diindikasikan. Dalam sistem input-output, indikator kinerja merupakan unsur-unsur gabungan pembentuk proses, sedangkan indikasi program merupakan unsur pembentuk output.

Dalam sistem evaluasi indikasi program, sistem dipandang dalam perspektif unsur-unsur gabungan yang membentuk satu kesatuan utuh dan dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Murwani (1999 : 25)

Gambar 3. Sistem Evaluasi Indikasi Program

Evaluasi terhadap kinerja program/proyek pembangunan sangat penting dilakukan sehingga hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam perencanaan pembangunan selanjutnya. Evaluasi terhadap kinerja program/proyek pembangunan dibagi dalam 2 tahapan, yaitu :

1. **Tahap Perencanaan**, yang dilakukan dengan menyusun indikator dan sasaran kinerja program/proyek pembangunan.
2. **Tahap pasca proyek/program**, yang dilakukan dengan studi evaluasi kinerja proyek pembangunan. Proyek-proyek yang sudah selesai secara selektif dievaluasi untuk mengetahui manfaat dan dampak yang dicapai, apakah sesuai atau tidak dengan indikator dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan

Sehingga evaluasi program/proyek pembangunan yang berbasiskan kinerja diharapkan mampu memperbaiki pengambilan keputusan dalam menentukan program/proyek, memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah melalui kebijakan, program dan proyek, serta memperbaiki akuntabilitas publik dari pelaksanaan program/proyek.

Pelaksanaan evaluasi kinerja berdasarkan penyusunan indikator dan sasaran kinerja, digunakan untuk melakukan evaluasi proyek pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan pada saat proyek selesai, tanpa melakukan analisis yang mendalam. Indikator dan sasaran kinerja yang disusun, terdiri dari 5 tingkatan, yaitu: masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak (Bappenas . 2007 : 18).

Menurut Bappenas (2007 : 22 - 23) dalam menentukan sumber atau alat untuk mendapatkan data/informasi yang digunakan untuk membuktikan indikator dan sasaran kinerja dari suatu program dimulai dari masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak yaitu :

- a. Data masukan (seperti besarnya dana dan rincian kegiatan), dapat diperoleh dari Departemen teknis, Kanwil/Dinas, Pemimpin Proyek, Direktorat Jenderal Anggaran-Departemen Keuangan, konsultan, kontraktor, dan instansi terkait.
- b. Data keluaran dapat diperoleh dari departemen teknis, instansi terkait dan pemerintah daerah dimana proyek tersebut berlokasi.
- c. Data dan informasi mengenai berfungsinya/hasil suatu keluaran, dapat diperoleh dari departemen teknis, instansi terkait, penerima manfaat, pemerintah daerah, dan masyarakat di sekitar lokasi proyek.
- d. Data dan informasi mengenai manfaat dapat ditanyakan pada penerima manfaat, Bappeda/Kanwil/Dinas, instansi terkait dan masyarakat di sekitar lokasi proyek.
- e. Data dan informasi untuk dampak dapat diperoleh dari departemen teknis, penerima manfaat, Kanwil, Dinas, Bappeda, Kantor Statistik setempat, dan instansi terkait.

5.1.1. Kajian Akademis Evaluasi Program Berbasis Indikator Kinerja

Menurut Hovland (2007 : 13 - 16) umumnya ada dua pendekatan penelitian akademik konvensional: *peer-review* oleh sesama akademisi serta jumlah kutipan dalam publikasi yang telah di *peer-review*. Namun kedua pendekatan tersebut terbukti sulit diterapkan untuk mengevaluasi program – program penelitian kebijakan sebab penelitian kebijakan memiliki tujuan yang lebih luas, antara lain

dampak kebijakan, perubahan perilaku, atau terjalannya hubungan, sementara kedua metode evaluasi konvensional tidaklah tepat digunakan untuk mengevaluasi tujuan-tujuan ini atau sangat sulit dievaluasi menggunakan kedua pendekatan konvensional ini. Metode – metode tersebut juga sulit diterapkan dalam mengevaluasi keluaran (*output*) yang dianggap penting dalam program penelitian kebijakan.

Singkatnya, program-program penelitian kebijakan memerlukan pendekatan-pendekatan Pemantauan dan Evaluasi (*Monitoring and Evaluation/ M&E*) yang baru di samping *peer review* akademik dan penghitungan kutipan konvensional; dengan demikian dapat diketahui apakah program-program tersebut mencapai tujuannya dan mengetahui **dampak** dari suatu program.

Istilah ‘dampak’ secara umum telah dikenal luas dalam dunia pembangunan, sejak istilah ini dimasukkan dalam kriteria untuk evaluasi bantuan pembangunan OECD-DAC, yaitu: relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan. Para peneliti kebijakan dalam bidang pembangunan internasional begitu akrab dengan konsep ini. Namun jika ide ‘dampak’ diaplikasikan dalam penelitian kebijakan, nampak jelas adanya perbedaan pertanyaan-pertanyaan yang muncul daripada ketika ide ‘dampak’ diterapkan dalam prakarsa-prakarsa bantuan pembangunan. Untuk mengukur dampak (juga relevansi, efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan) penelitian kebijakan, kita memerlukan proses dan metode yang mencakup aspek keterkaitan antara penelitian dengan kebijakan yang kompleks.

Untuk memahami konsep dampak, perlu untuk memahami beberapa istilah kunci yang digunakan dalam bidang ini, yaitu: keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*). Meskipun istilah-istilah tersebut banyak digunakan dalam tulisan-tulisan mengenai evaluasi, tetapi belum ada definisi yang seragam atas istilah-istilah tersebut. Manajemen berbasis hasil (*Result-Based Management (RBM)*) menggunakan model Masukan (*Inputs*) > Kegiatan (*Activities*) > Keluaran (*Outputs*) > Hasil (*Outcomes*) > Dampak (*Impacts*), dimana ‘outcomes’ diartikan sebagai pencapaian jangka menengah, dan ‘dampak’ berarti hasil-hasil jangka panjang (manfaat / *Benefit*). Dalam model Jalur Dampak (*The Impact Pathway*) yang digunakan oleh CGIAR (*Consultative Group on International Agricultural*

Research), ‘outcome’ didefinisikan sebagai hasil-hasil program yang digunakan, diadopsi atau membawa pengaruh eksternal dan menimbulkan “*perubahan pengetahuan, identitas (attributes), kebijakan, kapasitas penelitian, praktek – praktek pertanian, produktivitas, keberlanjutan atau faktor-faktor lain yang diperlukan untuk memperoleh dampak yang diinginkan*”

Model jalur dampak ini juga digunakan oleh CGIAR untuk mengevaluasi Program Tantangan Air dan Pangan (*Challenge Programme on Water and Food/CPWF*) suatu program yang terdiri dari 51 proyek penelitian dan terbagi dalam lima kelompok tema penelitian, di sembilan daerah aliran sungai (Limpopo, Nil, Kuning, Sao Francisco, Karkheh, Mekong, Nil, Volta dan sistem Andean). Pada tahun 2006 jumlah lembaga yang berpartisipasi mencapai 198, termasuk diantaranya pusat - pusat penelitian dibawah CGIAR, lembaga – lembaga penelitian, LSM, organisasi kemasyarakatan, dan juga sistem penelitian dan pengembangan pertanian nasional. Singkatnya, model Jalur Dampak memperjelas terbangunnya jaringan-jaringan para aktor dan bagaimana para aktor menggunakan *output* yang dihasilkan suatu program atau proyek untuk membantu menghubungkan hasil (*outcomes*) langsung dan dampak akhir.

Selain itu menurut Hovland (2007 : 33 -34) ada dua lembaga dalam CGIAR yaitu IFPRI dan ACIAR, di mana Lembaga Penelitian Kebijakan Makanan Internasional (IFPRI) di Washington DC telah melakukan penilaian mengenai dampak penelitian kebijakan yang dilaksanakannya sejak pertengahan tahun 1990. Mereka menemukan bahwa **pendekatan studi kasus** merupakan pendekatan paling tepat untuk mengungkapkan, mengukur dan mendokumentasikan dampak – dampak penelitian kebijakan. Pada permulaan 1998, mereka melakukan serangkaian studi kasus dengan melihat proses-proses kebijakan yang relevan serta penggunaan informasi oleh pembuat kebijakan. Mereka menerbitkan satu seri Makalah Diskusi Pengukuran Dampak yang dihasilkan dari studi-studi yang dilakukannya (www.ifpri.org/impact/impact.htm). Mereka mengidentifikasi sebuah proyek penelitian kebijakan dan lantas mencatat tahapan-tahapan yang dilalui serta dampak yang terjadi selama tahapan-tahapan tersebut berlangsung.

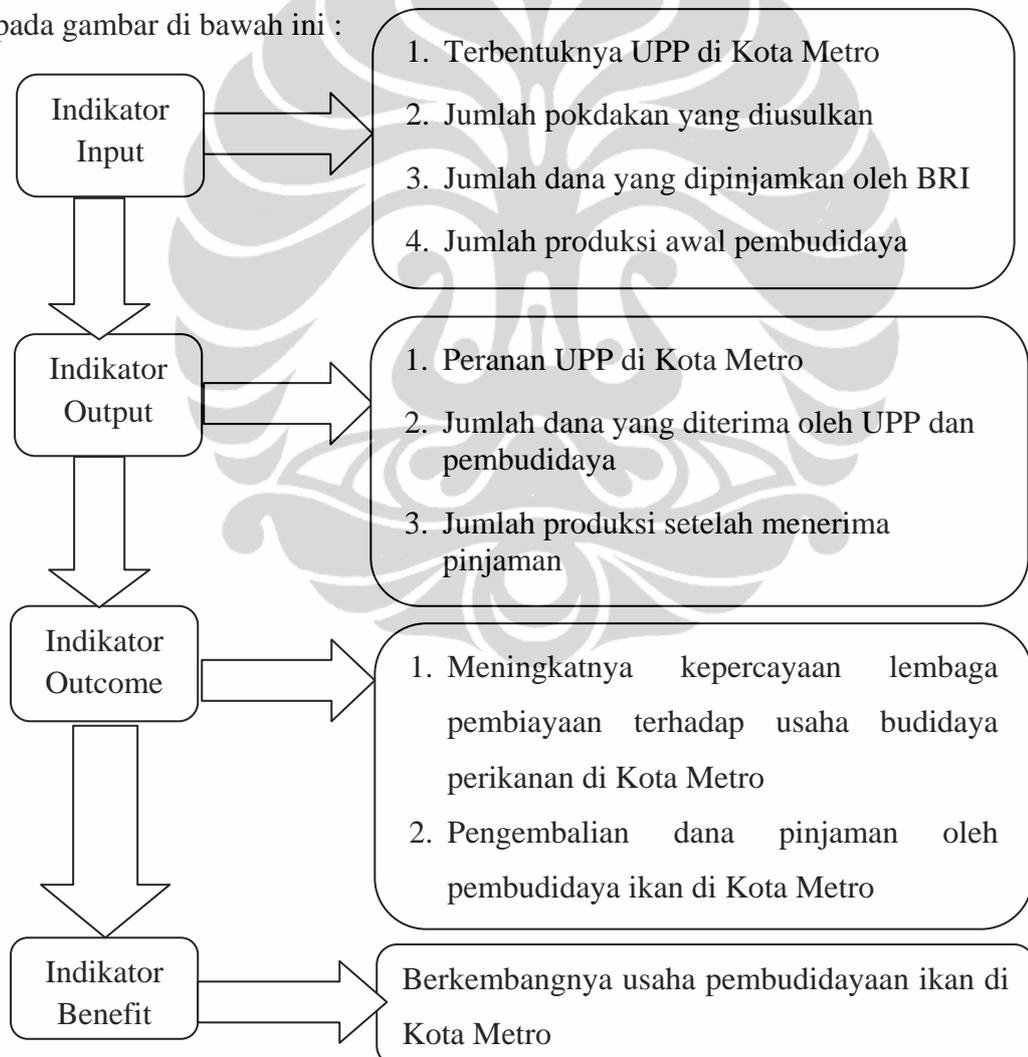
Sedangkan *The Australian Centre for International Agricultural Research* (ACIAR) di Canberra telah memfokuskan pada pengukuran dampak ekonomi proyek-proyek dan penelitian kebijakan yang dilakukannya. Dalam penelitian pertanian, dampak ekonomi seringkali diukur berdasarkan atas kuantifikasi nilai peningkatan produktifitas ataupun penghematan yang dilakukan. Seringkali ada anggapan bahwa peningkatan produktifitas semacam itu akan meningkatkan hasil ekonomi yang diperoleh oleh kelompok target yang lebih luas, sehingga akan dengan sendirinya mencapai tujuan akhir yaitu pengurangan kemiskinan. Jadi sebenarnya dalam sebagian besar kasus yang dipentingkan adalah menghitung indikator-indikator menengah daripada keuntungan sebenarnya bagi kaum miskin. Seperti halnya IFPRI, ACIAR juga telah mempublikasikan Seri Penilaian Dampak mereka sendiri sejak 1998 (www.aciar.gov.au/web.nsf/doc/ACIA-5KL9S2), yang memaparkan seluruh studi-studi dampak yang telah mereka lakukan hingga sekarang.

5.2. Evaluasi Program Dana Penguatan Modal Di Kota Metro

Program dana penguatan modal bagi pembudidaya ikan skala kecil ini merupakan program pemerintah yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat berupa partisipasi pemerintah, swasta dan masyarakat khususnya masyarakat pembudidaya ikan. Program pemberdayaan memunculkan kebutuhan partisipasi lapisan bawah untuk kemudian mewujudkan pemberdayaan di semua lapisan di mana dalam hal ini program pemerintah dianggap sebagai bantuan antara untuk diolah menjadi gerakan masyarakat yang berdaya sehingga dalam mengevaluasi program yang bersifat pemberdayaan masyarakat berbeda dengan program pemerintah yang bersifat *top down* karena tidak menampilkan manfaat dari partisipasi masyarakat yang menerima program (Agusta . 2002 : 3)

Dalam penelitian ini untuk mengukur evaluasi program dana penguatan modal melalui mekanisme pinjaman bagi pembudidaya ikan skala kecil di Kota Metro penulis menggunakan indikator keberhasilan yang ada di petunjuk pelaksanaan (juklak) direktorat jenderal (Ditjen) Perikanan Budidaya DKP RI Tahun 2006 yang meliputi pengukuran terhadap indikator input, output, outcome dan benefit. Penggunaan indikator input pada penelitian adalah digunakan untuk

melihat sumberdaya yang digunakan baik berupa sumberdaya manusia maupun finansial (dana) serta sarana fisik lainnya yang merupakan prasyarat dari pelaksanaan kegiatan / program dana penguatan modal, sedangkan pengukuran indikator output digunakan untuk melihat hasil keluaran dari pelaksanaan program / kegiatan dana penguatan modal bagi pembudidaya ikan di Kota Metro, untuk pengukuran indikator outcome digunakan untuk melihat sejauh mana manfaat yang telah dicapai secara optimal bila keluaran dapat diselesaikan seperti diuraikan dalam indikator hasil dan untuk pengukuran indikator benefit adalah untuk melihat dampak dari pelaksanaan program dana penguatan modal di Kota Metro. Sehingga secara ringkas pengukuran indikator – indikator tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 4. Desain Evaluasi Program Dana Penguatan Modal

5.2.1. Indikator Input

Menurut Suryahadi dalam Bappenas (2007 : 80) menyatakan bahwa penggunaan indikator input adalah untuk melihat sumberdaya yang digunakan baik berupa sumberdaya manusia maupun finansial (dana) serta sarana fisik lainnya yang merupakan prasyarat dari pelaksanaan kegiatan / program dana penguatan modal untuk menghasilkan ouput.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan indikator input yang ada di petunjuk pelaksanaan (Juklak) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Budidaya tentang mekanisme pelaksanaan program dana penguatan modal 2006 yaitu meliputi Terbentuknya UPP di Kota Metro, Jumlah Pokdakan yang diusulkan sebagai calon penerima DPM, Jumlah pinjaman yang disalurkan oleh BRI Metro dan Jumlah produksi Pokdakan sebelum menerima pinjaman. Adapun analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah berdasarkan hasil wawancara dengan pihak – pihak yang terkait serta dengan mengkros cek data melalui dokumen.

A. Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) Kota Metro

Untuk melihat keberhasilan indikator input pada keterbentukan UPP atau lembaga bagi pembudidaya ikan ini penulis meneliti dari dokumen yang ada dan berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua UPP dan Kepala Bidang Perikanan Dinas Pertanian Kota Metro.

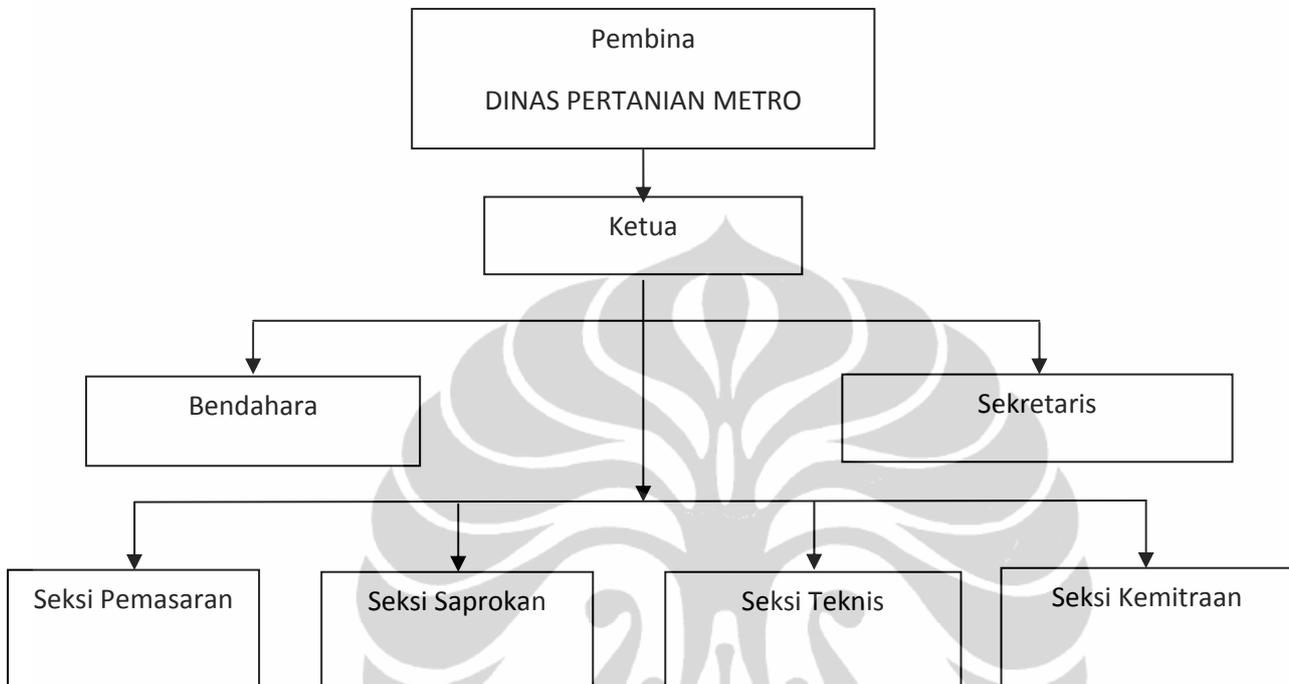
Berdasarkan dokumen yang ada terlihat bahwa UPP Kota Metro terbentuk pada Tahun 2006 berdasarkan SK Walikota Metro Nomor 185/KPTS/D.9/2006 pada Tanggal 27 Juli 2006.

Berdasarkan SK Walikota Metro UPP mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan teknis operasional, manajemen usaha, sarana dan prasarana terhadap Pokdakan
2. Mengadakan pertemuan antar pokdakan minimal 1 kali dalam sebulan
3. Melakukan pembukuan penggunaan dan pengembalian pinjaman permodalan masing – masing Pokdakan

4. Menjalani dan membuat kerjasama dengan perusahaan mitra yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS)

Adapun susunan kepengurusan UPP Kota Metro adalah sebagai berikut :



Sumber : Profil UPP Kota Metro Tahun 2007

Gambar 5. Tata Organisasi UPP Kota Metro

Sedangkan dari hasil wawancara dengan Kabid Perikanan Dinas Pertanian Kota Metro menyatakan bahwa adapun latar belakang terbentuknya UPP ini adalah sebagai mitra Pemerintah dalam meningkatkan pelayanan terhadap seluruh aspek kegiatan pembudidaya ikan secara terus menerus agar dapat lebih mandiri serta sebagai mitra pemerintah dalam penyaluran dana penguatan modal kepada Pokdakan serta sebagai tempat untuk menyediakan berbagai kebutuhan diantaranya peningkatan SDM di bidang pembibitan, pembesaran, pembuatan pakan, pengelolaan dan pemasaran hasil produksi perikanan masyarakat.

Sedangkan dari hasil wawancara dengan Ketua UPP menyatakan bahwa UPP terbentuk sebagai wadah tempat bergabungnya kelompok

pembudidaya ikan (Pokdakan) di Kota Metro yang menjadi mitra Pemerintah dalam pelaksanaan program Dana Penguatan Modal dan untuk mengakomodir keinginan dari pembudidaya di Kota Metro untuk bersatu dalam suatu wadah yang dapat menampung aspirasi dari pembudidaya ikan dan dapat menjembatani hubungan antara pembudidaya ikan dengan pemerintah sehingga pemerintah dapat mengetahui aspirasi dari keinginan pembudidaya ikan serta dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada pembudidaya ikan sehingga pada akhirnya terjadi kesesuaian antara program pemerintah dengan keinginan pembudidaya.

B. Jumlah Pokdakan yang diusulkan sebagai calon penerima DPM

Untuk melihat keberhasilan indikator input pada jumlah kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) calon penerima DPM ini penulis meneliti dari data dokumen hasil identifikasi pengurus UPP dan Dinas Pertanian Kota Metro dan berdasarkan wawancara dengan Ketua UPP, Seksi Teknis UPP, serta Kabid Perikanan Dinas Pertanian Kota Metro.

Dari data hasil identifikasi yang terdapat di UPP Kota Metro terlihat bahwa dana penguatan modal (DPM) ini disalurkan untuk 8 Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) dengan jumlah pembudidaya ikan sebanyak 30 orang di mana masing – masing pembudidaya ikan mendapatkan sebesar Rp.3.000.000,-. Adapun nama Pokdakan dan Pembudidaya penerima DPM 2006 dapat dilihat pada lampiran1.

Dari hasil identifikasi menunjukkan bahwa calon penerima DPM adalah berjumlah 30 orang pembudidaya yang tergabung dalam 8 kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) dengan jumlah alokasi pinjaman untuk masing – masing pembudidaya sebesar Rp.3.000.000,-.

Dari hasil wawancara dengan Ketua UPP Metro menyatakan bahwa pada saat berdirinya UPP Kota Metro pada tahun 2006 telah mempunyai anggota sebanyak 30 Pokdakan yang terdiri dari 350 orang pembudidaya ikan dikarenakan jumlah DPM hanya sebesar Rp.90.000.000,- maka jumlah pembudidaya yang menerima hanya sebanyak 30 orang dengan nominal

peminjaman sebesar Rp.3.000.000,- / pembudidaya dan dikhususkan untuk pembudidaya ikan lele.

Sedangkan dari hasil wawancara terhadap Seksi Teknis UPP Metro menyatakan bahwa pembudidaya yang diusulkan untuk menerima dana penguatan modal (DPM) ini adalah semua anggota UPP dan berdasarkan hasil identifikasi UPP dan Dinas Pertanian Kota Metro yang berhak menerima adalah mereka yang sudah menjalankan usaha budidaya ikan lele minimal 2 tahun dan belum pernah mendapatkan bantuan modal dari program pemerintah seperti Bupedes.

Sedangkan menurut Kabid Perikanan Dinas Pertanian Kota Metro menyatakan bahwa proses identifikasi untuk calon penerima dana penguatan modal (DPM) ini yang sangat berperan adalah UPP karena untuk menghindari intervensi dari pihak lain sebab dengan UPP yang lebih berperan dalam proses identifikasi maka hasil yang didapatkan akan lebih terpercaya.

Selain berdasarkan hasil identifikasi yang ada di UPP penulis juga melakukan wawancara dengan pembudidaya yang terdaftar di data tersebut untuk mengecek kebenaran data yang ada mengenai proses pelaksanaan identifikasi yang dijalankan oleh UPP bersama Dinas Pertanian Kota Metro.

Dari wawancara dengan seluruh pembudidaya ikan penerima DPM bahwa proses identifikasi yang dilakukan oleh UPP bersama Dinas Pertanian Kota Metro, pembudidaya ikan dilakukan wawancara oleh tim identifikasi tentang usaha budidaya ikan yang telah dijalankan dan telah berapa lama usaha dijalankan serta jenis ikan yang dibudidayakan serta berapa luas kolam yang dimiliki.

C. Jumlah pinjaman yang disalurkan oleh BRI Metro

Untuk melihat keberhasilan indikator input untuk jumlah pinjaman yang disalurkan oleh BRI ke kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) calon penerima DPM ini penulis meneliti dari data dokumen yang ada di UPP serta melakukan kroscek data melalui wawancara dengan Petugas BRI Metro, Ketua UPP dan pembudidaya penerima DPM.

Dari dokumen yang ada di UPP menyebutkan bahwa jumlah pinjaman yang disalurkan oleh BRI Metro dari jumlah agunan sebesar Rp.90.000.000,- yang terdapat di rekening giro UPP Kota Metro hanya sebesar Rp.86.850.000,- yang disalurkan oleh BRI kepada masing – masing Pokdakan.

Adapun jumlah dana yang disalurkan oleh BRI kepada kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) dapat terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5. Jumlah Pinjaman yang Disalurkan oleh BRI

No	Kelompok Penerima	Jumah Pinjaman (Rp)
1	Kerto Basuki	11.580.000
2	Mina Sari	8.685.000
3	Tunas Maju	11.580.000
4	Usaha Muda	8.685.000
5	Mina Jaya	11.580.000
6	Yosomino 21	11.580.000
7	Bina Mulya	11.580.000
8	Sidomaju I	11.580.000
	Jumlah	86.850.000

Sumber : Laporan UPP Kota Metro Tahun 2007

Dari data penyaluran DPM oleh BRI terlihat bahwa jumlah dana yang disalurkan kepada pokdakan tidak sesuai dengan jumlah dana yang diagunkan oleh pemerintah melalui rekening giro UPP, di mana terdapat selisih sebesar Rp.3.150.000,- antara jumlah dana yang diagunkan dengan jumlah dana yang disalurkan oleh BRI.

Dan berdasarkan hasil wawancara terhadap petugas BRI Metro menyatakan bahwa dari agunan yang ada di rekening giro UPP Kota Metro sebesar Rp.90.000.000,- dengan alokasi untuk masing – masing pembudidaya ikan sebesar Rp.3.000.000,- hanya sebesar Rp.2.895.000,- yang diterima oleh pembudidaya hal ini terjadi karena adanya pemotongan sebesar Rp.105.000 untuk setiap pembudidaya ikan yang digunakan sebagai pergantian biaya administrasi berupa materai 6 buah dan biaya fotocopi berkas berupa surat permohonan pinjaman dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Sedangkan dari hasil wawancara dengan Ketua UPP diketahui bahwa pemotongan tersebut merupakan biaya materai sebanyak 6 buah dan fotocopy berkas tetapi untuk tahap pengembalian tetap berupa jumlah uang yang diterima oleh masing – masing pembudidaya ikan karena biaya tersebut akan ditutupi oleh pembagian hasil dari Bank dan UPP sebesar 2 % dari bunga pinjaman yang besarnya 6% / tahun, sehingga tetap tidak memberatkan pembudidaya ikan.

Sedangkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada seluruh pembudidaya ikan penulis mendapatkan gambaran bahwa untuk pinjaman yang ditanggung oleh pembudidaya ikan hanya sebesar jumlah yang diterima dari BRI yaitu untuk masing – masing pembudidaya hanya sebesar Rp.2.895.000,- bukan sebesar Rp.3.000.000,- seperti alokasi awal dana yang dianggarkan tetapi hal ini menyebabkan terjadinya perubahan rencana anggaran yang telah direncanakan oleh pembudidaya ikan sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut penulis melihat bahwa dalam proses penyaluran DPM yang dilakukan oleh BRI kepada pembudidaya ikan tidak sesuai dengan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah ke rekening giro UPP walaupun hal tersebut dari segi pengembalian yang dilakukan oleh pembudidaya ikan ke BRI tidak ada permasalahan di mana pembudidaya ikan hanya mengembalikan jumlah dana yang diterima tetapi dari segi perencanaan untuk kebutuhan yang diperlukan dalam usaha budidaya ikan

lele sangat berpengaruh, hal ini dapat terlihat dalam data rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) pada tabel di bawah ini :

Tabel 6. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)

Modal Kerja						Jumlah Pinjaman (Rp)
Bibit Ikan		Pakan Ikan		Bahan Lainnya		
Jumlah (ekor)	Harga (Rp)	Jumlah (kg)	Harga (Rp)	Jumlah (unit)	Harga (Rp)	
4000	400.000	500	2.500.000	1	100.000	3.000.000

Sumber : RDKK Kelompok Mina Sari

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa sebelum melakukan pinjaman pembudidaya ikan telah merencanakan penggunaan dana tersebut, di mana dari RDKK tersebut terlihat bahwa jumlah dana yang diinginkan oleh pembudidaya ikan untuk pembelian benih, pakan dan kebutuhan lainnya seperti pupuk dan kapur adalah sebesar Rp.3.000.000,- sesuai dengan dana yang dialokasikan pemerintah ke rekening giro UPP dan dengan adanya perubahan jumlah pinjaman yang diterima akan menyebabkan perubahan dari rencana yang telah di buat oleh pembudidaya ikan.

Oleh karena itu untuk kegiatan yang akan datang diharapkan pihak perbankan dapat menyalurkan dana pinjaman sesuai dengan dana yang diagunkan oleh pemerintah.

D. Jumlah produksi Pokdakan sebelum menerima pinjaman

Untuk melihat keberhasilan indikator input pada jumlah produksi kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) calon penerima DPM sebelum mendapatkan pinjaman DPM penulis meneliti dari data dokumen yang ada di UPP dari hasil identifikasi dan melakukan wawancara kepada pembudidaya ikan dan Tenaga Pendamping Tehnologi (TPT) UPP .

Dari data hasil identifikasi yang dilakukan oleh UPP penulis mendapatkan data mengenai jumlah produksi masing – masing pembudidaya ikan sebelum mendapatkan dana pinjaman DPM (lampiran 2).

Dari data produksi pembudidaya ikan sebelum menerima DPM menunjukkan bahwa jumlah Produksi pokdakan masih sangat rendah di mana padat tebar yang diusahakan hanya sebesar 10 – 20 ekor /M² dan dengan tingkat keberhasilan hidup (SR = jumlah ikan yang hidup / jumlah ikan yang ditebar x 100%) antara 50 – 60 % dengan size penjualan 10 ekor/kg dengan waktu pemeliharaan selama 4 bulan – 5 bulan dan untuk produktifitas nya masih sangat rendah yaitu hanya sebesar 0.6 kg/m².

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh pembudidaya ikan penerima DPM diketahui bahwa produksi yang dihasilkan masih rendah karena keterbatasan modal usaha untuk mengembangkan usahanya karena benih yang di tebar sangat sedikit dibandingkan dengan luas lahan hal ini berkaitan dengan pakan yang digunakan sedangkan dari hasil wawancara dengan Tenaga Pendamping Teknologi (TPT) diketahui bahwa produksi budidaya yang dihasilkan kecil dikarenakan masih minimnya pengetahuan pembudidaya ikan tentang teknik budidaya yang benar di mana selama ini pembudidaya ikan melakukan usahanya hanya sebatas dari pengalaman sehingga tingkat kematian ikan masih tinggi (masih rendahnya SR hasil budidaya ikan) dan intensitas pemberian dengan menggunakan pakan ikan berupa *pellet* sangat rendah disebabkan karena nilai jual ikan lebih rendah dibandingkan dengan biaya operasional untuk pembelian pakan.

5.2.2. Indikator Output

Menurut Suryahadi dalam Bappenas (2007 : 80) menyatakan bahwa output merupakan hasil berupa produk dan layanan yang dihasilkan oleh aktifitas – aktifitas program.

Menurut Agusta (2002 : 9) menyatakan bahwa evaluasi terhadap hasil program berguna untuk memperlihatkan sampai sejauh mana pelaksanaan

program efektif dan efisien serta untuk memperoleh informasi faktor – faktor pendorong keberhasilan dan kegagalan program serta hubungan antara faktor – faktor tersebut terhadap kinerja pihak – pihak yang terkait dalam mewujudkan tujuan program.

Menurut Hovland (2007 : 63 - 64) Metode evaluasi dengan pengukuran hasil program digunakan sebagai penekanan secara eksplisit terhadap *hubungan dan perubahan* yaitu:

- Perubahan Tingkah Laku: ‘hasil akhir’ suatu program penelitian didefinisikan sebagai perubahan tingkah laku, hubungan, aktifitas atau tindakan seseorang, kelompok dan organisasi yang langsung berkaitan dengan program. Hasil akhir ini dapat secara logika terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu program, meskipun tidak berarti disebabkan secara langsung oleh aktivitas tersebut
- Mitra Terkait (*Boundary Partners*): Individu-individu, kelompok, dan organisasi yang berinteraksi langsung dan memiliki kesempatan untuk mempengaruhi suatu program. Sebagian besar aktifitas akan menghasilkan hasil akhir yang lebih dari satu karena adanya mitra terkait yang lebih dari satu.
- Kontribusi: Pemetaan Hasil tidak dapat digunakan untuk mengklaim pencapaian dampak - dampak pembangunan, karena metode ini memfokuskan pada kontribusi suatu program terhadap hasil. Pada akhirnya hasil ini mungkin juga akan meningkatkan dampak pembangunan namun demikian hubungan yang terjadi tidaklah selalu merupakan hubungan langsung sebab dan akibat.

Pemetaan Hasil mengembangkan suatu visi mengenai kemajuan yang lebih baik atas manusia, sosial, dan lingkungan yang ingin didukung oleh suatu program; sehingga Pemantauan dan Evaluasi lantas dipusatkan terhadap faktor-faktor dan aktor-aktor yang terkait langsung dengan program tersebut. Pemetaan Hasil tidak mengabaikan pentingnya perubahan suatu keadaan (misalnya air yang lebih bersih atau ekonomi

yang lebih kuat) namun sebaliknya melihat bahwa setiap perubahan yang terjadi atas suatu keadaan akan disertai perubahan tingkah laku.

Sedangkan dalam penelitian ini penulis mengukur indikator output didasarkan dari faktor input yang ada, yaitu sampai sejauh mana output yang dihasilkan dari pelaksanaan program DPM ini.

A. Peranan UPP Kota Metro dalam membantu Pembudidaya Ikan

Untuk melihat keberhasilan indikator output untuk kegiatan UPP didasarkan dari hasil wawancara dengan Ketua UPP dan seluruh pembudidaya penerima DPM.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pembudidaya yang menerima dana penguatan modal ini menyatakan pada awal sebelum terbentuknya Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) Kota Metro harga jual ikan lele di tingkat pembudidaya hanya sebesar Rp.5.500 – 6.000,- hal ini disebabkan karena lemahnya nilai tawar pembudidaya terhadap harga jual ikan lele, di mana menurut mereka bahwa dengan sudah waktunya masa panen maka pembudidaya akan langsung menjual hasil produksinya dan pada saat terjadi panen raya atau bersamaan maka harga jual akan turun sedangkan setelah adanya UPP maka pada saat terjadi hal tersebut UPP akan menampung produksi pembudidaya karena UPP telah mempunyai mitra penjualan sehingga harga ikan di pembudidaya dapat meningkat dan terkontrol harganya dan saat ini harga jual ikan di tingkat pembudidaya menjadi Rp.9.000,-. Selain itu dengan adanya UPP pembudidaya mempunyai tempat berkumpul baik untuk sarana bersilaturahmi maupun untuk saling bertukar informasi terbaru mengenai usaha budidaya ikan khususnya ikan lele seperti menurut Ketua kelompok Bina Mulya menyatakan bahwa pada saat ikan lele yang diusahakan oleh kelompok mereka terkena penyakit, hal ini langsung diinformasikan ke UPP dan dengan perantaraan UPP maka tim monitoring penyakit langsung dapat turun ke lapangan dengan cepat untuk memberikan bantuan obat – obatan ikan ke pembudidaya. Sedangkan menurut

Ketua UPP menyatakan bahwa dengan berdirinya UPP Kota Metro ini menyebabkan terjalinnya silaturahmi antar pembudidaya dan hubungan antara pembudidaya ikan dengan pemerintah dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan kecurigaan, di mana sebelum UPP terbentuk masih banyak pembudidaya yang enggan untuk bertemu dan berkonsultasi dengan aparat pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian Kota Metro tetapi dengan adanya UPP setiap 1 bulan sekali diadakan pertemuan antara pembudidaya dan aparat pemerintah sehingga hubungan yang terjalin menjadi akrab.

B. Jumlah DPM yang diterima UPP Kota Metro dan pembudidaya ikan secara tepat waktu dan tepat jumlah

Untuk melihat keberhasilan indikator output untuk kegiatan jumlah DPM yang diterima UPP Kota Metro didasarkan dari hasil wawancara dengan Ketua UPP dan Kabid Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung sedangkan untuk jumlah DPM yang diterima pembudidaya didapatkan dari data UPP dan melakukan kroscek ke seluruh pembudidaya penerima DPM.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua UPP Kota menyatakan bahwa proses pencairan DPM ke rekening giro UPP melalui beberapa tahap pelaksanaan, yaitu :

1. UPP bersama – sama Dinas Pertanian Kota Metro pada bulan April 2006 melakukan identifikasi ke Pokdakan (kelompok pembudidaya ikan) sebagai calon penerima DPM untuk direkomendasikan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung di mana proses identifikasi ini ditujukan untuk pembudidaya yang memenuhi persyaratan yaitu :
 - (a) belum pernah menerima bantuan modal dari pemerintah;
 - (b) sudah melakukan usaha budidaya ikan selama 2 tahun;
 - (c) usaha budidaya yang diusahakan adalah ikan lele;
2. Selanjutnya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung melakukan verifikasi ke lapangan pada bulan Agustus 2006 untuk

meninjau kelayakan dari calon penerima DPM yang diusulkan oleh UPP Kota Metro untuk menetapkan sebagai penerima DPM 2006 serta menjelaskan kepada pembudidaya ikan bahwa DPM ini merupakan dana pinjaman dari BRI sehingga pembudidaya yang telah lulus verifikasi dianjurkan membuka rekening tabungan di BRI Metro yang bertujuan untuk proses pencairan dan pengembalian DPM. Menurut Kabid Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung menyatakan bahwa proses verifikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung ini juga bertujuan untuk mengecek Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang merupakan perincian untuk penggunaan dana yang akan dipinjam nanti sehingga jelas peruntukannya bahwa DPM ini digunakan untuk usaha budidaya ikan dan bukan dipergunakan untuk hal lain serta melihat langsung usaha budidaya ikan yang dijalankan oleh pembudidaya ikan di Kota Metro.

3. Setelah dilakukan penetapan terhadap pembudidaya ikan calon penerima DPM maka UPP Kota Metro membuka rekening giro di BRI Metro dan Ketua UPP Kota Metro melakukan perjanjian kerjasama dengan Kancab BRI Metro pada tanggal 12 Oktober 2006 dengan No.B.3573/KC-IV/ADK/10/2006 untuk memblokir rekening giro tersebut dan pihak BRI tidak memberikan cek/bilyet giro kepada UPP Kota Metro;
4. Setelah UPP Kota Metro membuka rekening giro di BRI maka proses selanjutnya BRI mencairkan dana pinjaman ke rekening kelompok.

Sedangkan dari wawancara dengan Kabid Budidaya Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung menyatakan bahwa proses pencairan dana penguatan modal telah sesuai dengan Tahun Anggaran 2006 dan prosesnya langsung masuk ke rekening giro UPP di BRI Cabang Metro dari Kantor Pelayanan Kas Negara (KPKN) hal

ini bertujuan agar dana yang dialokasikan sesuai dengan dana yang diterima untuk disalurkan ke pembudidaya ikan tanpa adanya biaya pemotongan apapun bentuknya dari pemerintah.

Sedangkan dari wawancara dengan pembudidaya ikan menjelaskan bahwa DPM ini telah mereka terima pada awal desember 2006, di mana pada bulan nopember mereka diharuskan untuk membuka rekening atas nama kelompok dan dalam hal ini diwakili oleh ketua kelompok dan bendahara kelompok untuk melakukan proses akad kredit dengan BRI selanjutnya setelah proses akad kredit uang tersebut langsung masuk ke rekening kelompok sebesar Rp.2.895.000,- untuk masing – masing pembudidaya dan selanjutnya diberikan ke anggotanya masing – masing.

C. Jumlah Produksi Pokdakan setelah Menerima Pinjaman

Pengukuran indikator output untuk kegiatan jumlah DPM yang diterima UPP Kota Metro didasarkan dari hasil wawancara dengan tenaga pendamping teknologi (TPT) dan hasil wawancara dengan seluruh pembudidaya penerima DPM.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tenaga Pendamping Teknologi (TPT) UPP Kota Metro diketahui bahwa usaha budidaya ikan yang dilakukan oleh pembudidaya ikan di Kota Metro belum mengikuti teknis budidaya yang baik terutama dalam pemilihan benih ikan yang baik, penebaran benih pada awal memasuki kolam pemeliharaan dan intensitas pemberian pakan dan penanggulangan penyakit hal ini yang menyebabkan tingkat produksi yang dihasilkan masih sangat rendah selain itu diketahui bahwa dari segi pendidikan pembudidaya ikan penerima DPM tidak ada yang merupakan sarjana perikanan sehingga pengetahuan tentang teknik budidaya yang baik dan benar belum dimiliki.

Dari tingkat pendidikan (*lampiran 3*) pembudidaya ikan di Kota Metro yang mendapatkan alokasi DPM dapat diketahui bahwa rata –

rata jenis pendidikan hanya SMA dan ada beberapa yang merupakan sarjana tetapi bukan dari sarjana perikanan sehingga usaha budidaya ikan yang dilakukan masih sebatas pengalaman dan bertanya ke pembudidaya lainnya.

Sedangkan dari hasil wawancara dengan para pembudidaya ikan diketahui bahwa dengan adanya program DPM ini mereka mendapatkan manfaat yang besar di mana selain mendapatkan bantuan modal pembudidaya ikan juga mendapatkan bantuan bimbingan teknis dari TPT UPP Kota Metro seperti cara pemilihan benih yang baik dan cara untuk menghindarkan kematian dini pada ikan sehingga pembudidaya dapat meningkatkan kelulushidupan (SR) dari ikan yang dibudidayakan dan dapat meningkatkan produksi dari usaha budidayanya dan produktifitas usaha juga mengalami peningkatan.

Hal ini sesuai dengan data yang didapatkan dari dokumen UPP Kota Metro untuk produksi pembudidaya ikan setelah menerima DPM mengalami peningkatan. Dari data UPP Kota Metro dapat diketahui bahwa dengan adanya pelaksanaan dari program DPM 2006 mempunyai dampak yang signifikan terhadap hasil produksi budidaya ikan lele dan terjadi peningkatan SR yang signifikan di mana pembudidaya ikan dapat menghasilkan produksi yang tinggi dengan SR antara 70 – 85 % (*lampiran 4*)

5.2.3. Indikator Outcome

Menurut Ruky dalam Mulya (2010:16) menyatakan bahwa outcome adalah perubahan atau dampak dari suatu program yang merupakan hasil dari output program.

Menurut Davies,etc dalam Hovland (2007 : 15) menyatakan untuk mengukur dampak (juga relevansi, efisiensi, efektifitas, dan keberlanjutan) penelitian kebijakan, kita memerlukan proses dan metode yang mencakup aspek keterkaitan antara penelitian dengan kebijakan yang kompleks.

Pengukuran hasil *outcome* dari suatu program merupakan hasil jangka panjang dari proses pelaksanaan program seperti perubahan tingkah laku, kebijakan, kapasitas dan atau praktek-praktek yang terjadi yang disebabkan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh penelitian (misalnya perubahan dalam implementasi kebijakan pemerintah, perubahan praktek kerja praktisi LSM, pengurangan kemiskinan di suatu wilayah tertentu, penguatan taraf hidup masyarakat, penguatan keterlibatan masyarakat dalam proses-proses kebijakan, dsbnya).

Sedangkan dalam penelitian ini penulis hanya melihat indikator outcome yang didasarkan dari juklak Ditjen Perikanan Budidaya tentang pelaksanaan program dana penguatan modal TA 2006, yaitu meliputi pengukuran terhadap peningkatan kepercayaan lembaga pembiayaan dalam hal ini perbankan dalam memberikan kredit bagi pembudidaya ikan dan pengembalian dana penguatan modal oleh pembudidaya ikan.

Seperti yang tertulis sebelumnya bahwa Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI mencoba memberikan bantuan pinjaman modal bagi pembudidaya ikan melalui akses perbankan dengan bunga pinjaman yang rendah yaitu melalui program dana penguatan modal bagi pembudidaya ikan skala kecil di mana dana yang ada dalam program ini merupakan agunan yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak perbankan dalam hal ini adalah Bank BRI sebagai Bank Pelaksana untuk menyalurkan kredit pinjaman ke pembudidaya ikan di Kota Metro, hal ini dilakukan oleh pemerintah agar di masa yang akan datang pembudidaya dapat melakukan penambahan modal melalui pinjaman langsung ke perbankan dan tidak mengharapkan bantuan dari program pemerintah sehingga pembudidaya menjadi mandiri dalam melakukan pengembangan usaha budidayanya.

A. Meningkatkan Kepercayaan Lembaga Pembiayaan (Perbankan) terhadap Usaha Budidaya Perikanan di Kota Metro

Menurut Kabid Perikanan Dinas Pertanian Kota Metro menyatakan bahwa Tingginya bunga pinjaman perbankan sangat dirasakan oleh pembudidaya ikan di Kota Metro di mana hal ini menyebabkan para pembudidaya ikan takut berurusan dengan perbankan serta keharusan adanya agunan yang nilainya lebih besar dibandingkan dengan pinjaman yang diterima, sehingga dengan adanya program dana penguatan modal (DPM 2006) merupakan awal dari pembudidaya ikan di Kota Metro berhubungan dengan perbankan hal ini dikarenakan bunga pinjaman dari DPM yang rendah yaitu hanya 6 % / tahun dan tidak menyertakan agunan karena agunan kepada pihak perbankan sudah ditanggulangi oleh pemerintah melalui dana penguatan modal (DPM) yang ada di rekening giro UPP Kota Metro.

Dari hasil wawancara dengan Ketua UPP Kota Metro dapat dijelaskan bahwa sebelum adanya program DPM ini tidak ada pembudidaya yang berani untuk meminjam modal ke perbankan dan tidak ada pihak perbankan yang mau memberikan pinjaman kepada pembudidaya ikan karena beranggapan bahwa usaha budidaya ikan terlalu berisiko sehingga dapat menyebabkan kredit macet, tetapi setelah adanya program DPM dengan bunga yang rendah terjadi perubahan paradigma dari pihak perbankan untuk menyalurkan kredit bagi pembudidaya ikan serta dari pihak pembudidaya ikan juga mau melakukan pinjaman ke perbankan. Adapun perkembangan dari pinjaman perbankan terhadap pembudidaya ikan di Kota Metro dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 7. Perkembangan Dana Pinjaman yang disalurkan oleh Perbankan bagi Pembudidaya Ikan di Kota Metro

No	Bank	Tahun Pinjaman	Jumlah Pinjaman (Rp)	Jumlah Pembudidaya (orang)
1	BRI Metro	2006	90.000.000	30
		2007	1.000.000.000	200

(sambungan Tabel 7)

2	Bank Lampung	2007	150.000.000	30
		2008	100.000.000	20
3	Bank Syariah Madani Metro	Sampai dengan bulan agustus 2010 masih dalam proses		

Sumber : Laporan UPP Kota Metro TA 2010

Dari data diatas saat ini selain BRI terdapat juga Bank Lampung di mana pada tahun 2007 ikut menyalurkan pinjaman kredit bagi pembudidaya ikan dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.150.000.000,- dengan alokasi pinjaman Rp.5.000.000,- / pembudidaya ikan. Dan pada tahun 2010 ini juga terdapat Bank Syariah Madani Metro yang akan menyalurkan kredit bagi pembudidaya ikan untuk pembuatan pakan ikan.

Sedangkan dari hasil wawancara dengan pembudidaya penerima DPM menyatakan bahwa sebelum adanya program DPM mereka takut untuk berurusan dengan perbankan dikarenakan bunga pinjaman yang tinggi dan keharusan adanya agunan yang terasa sangat berat bagi pembudidaya serta ketakutan terhadap pengurusan di perbankan yang lama.

Dari hasil diatas penulis menggambarkan bahwa dampak dari adanya program DPM ini telah membuka paradigma terhadap pandangan perbankan mengenai usaha budidaya perikanan khususnya di Kota Metro di mana tingkat kepercayaan lembaga keuangan (perbankan) di Kota Metro mengalami peningkatan yaitu dengan adanya pinjaman dari perbankan melalui BRI dan Bank Lampung.

Di mana pada tahun 2007 tanpa adanya agunan dari pemerintah pihak perbankan telah memberikan kredit bagi pembudidaya ikan di Kota Metro dengan jumlah dana yang lebih besar dari program dana penguatan modal TA 2006. Peningkatan kepercayaan lembaga keuangan dalam hal ini perbankan disebabkan karena pada tahun 2007 terjadi peningkatan produksi hasil perikanan yang diikuti dengan kenaikan harga jual ikan sehingga pembudidaya yang menerima DPM 2006 telah mulai melakukan pengangsuran pinjaman ke BRI.

B. Pengembalian Dana Penguatan Modal Oleh Pembudidaya Ikan di Kota Metro

Untuk melihat keberhasilan indikator outcome untuk kegiatan ini didasarkan dari dokumen UPP dan hasil wawancara dengan seluruh pembudidaya penerima DPM. Dari hasil penelitian yang berdasarkan dokumen UPP Kota Metro didapatkan hasil bahwa terjadi permasalahan dalam segi pengembaliannya di mana dari total 8 kelompok (pokdakan) hanya 3 kelompok yang dapat melunasi 100% jumlah pinjaman yang diterima seperti terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 8. Perincian Pemanfaatan dan Pengembalian DPM

No	Nama Kelompok	Realisasi DPM (Rp)	Pengembalian (Rp)			
			Pokok	Bunga	Total	Sisa
1	Kerto Basuki	11.580.000	1.373.477	226.523	1.600.000	9.980.000
2	Mina Sari	8.685.000	8.685.000	487.993	9.172.993	-
3	Tunas Maju	11.580.000	6.327.797	846.203	7.174.000	4.406.000
4	Usaha Muda	8.685.000	5.531.379	868.621	6.400.000	2.285.000
5	Mina Jaya	11.580.000	11.580.000	887.668	12.467.668	-
6	Yosomino 21	11.580.000	6.909.035	857.565	7.766.600	3.813.400
7	Bina Mulya	11.580.000	1.653.552	346.448	2.000.000	9.580.000
8	Sidomaju I	11.580.000	11.580.000	827.718	12.407.718	-
Jumlah		86.850.000	53.640.240	5.408.689	59.048.929 (67,99%)	27.801.071

Sumber : laporan UPP TA 2010

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa total pengembalian DPM oleh pembudidaya ikan sampai dengan tahun 2010 sebesar Rp.59.048.929 atau sebesar 67,99 % dari total pinjaman sebesar Rp.86.850.000,- yang diterima oleh UPP Kota Metro.

Dari hasil survey dan wawancara terhadap pembudidaya penerima DPM di Kota Metro tentang permasalahan pengembalian DPM ini peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut :

- a. Untuk kelompok pembudidaya ikan yang dapat melunasi pengembalian DPM dengan lunas menurut hasil wawancara dengan Ketua kelompok Mina Sari, Mina Jaya dan Sidomaju I pelunasan DPM dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1,5 tahun pinjaman hal ini dikarenakan kelompok mereka tidak ada yang melakukan penambahan investasi usaha sebelum pinjaman lunas.
- b. Sedangkan 5 Kelompok lainnya yang belum melunasi pinjaman dikarenakan mereka mengembangkan usahanya dengan menambah investasi untuk pembuatan kolam hal ini disebabkan karena pada tahun 2007 terjadi *booming* produksi ikan lele dengan diikuti naiknya harga jual ikan lele di pembudidaya di mana pada awalnya harga ikan lele di tingkat pembudidaya hanya sebesar Rp.5.500 – 6.000,- menjadi Rp.7.500,- - Rp.9.000,- dengan harga pakan Rp.5.000,- hal ini yang menyebabkan pembudidaya ikan menambah investasinya karena sangat menguntungkan sehingga hasil penjualan ikan yang seharusnya digunakan untuk membayar pinjaman digunakan untuk penambahan investasi, tetapi sayangnya pada Tahun 2008 terjadi kenaikan harga pakan sebesar 40 % yaitu sebesar Rp.7.000,- /kg dan benih ikan lele yaitu di mana harga benih ikan lele yang awalnya hanya Rp.100/ekor menjadi Rp. 200 atau meningkat 100 % sehingga terjadi peningkatan biaya produksi dan berimbas pada pelunasan DPM karena hasil penjualan pada musim tanam berikutnya hanya dapat untuk memutar usaha budidayanya dan tidak bisa untuk mengangsur pinjaman.

Dari data kenaikan biaya produksi (*lampiran 5*) menggambarkan bahwa pada Tahun 2007 biaya produksi untuk usaha budidaya ikan lele dengan harga pakan Rp.5.000,-/kg dan harga benih ikan Rp.100,-/ekor dengan padat tebar 5000ekor/100m² maka jumlah biaya produksi yang dibutuhkan oleh pembudidaya ikan sebesar Rp.3.000.000,- dengan hasil produksi 500 kg/panen dan jika dikalikan dengan harga penjualan Rp.7.500 – Rp.9.000,- /kg maka total penghasilan pembudidaya ikan sebesar Rp.3.750.000,- - Rp.4.500.000,- sehingga pembudidaya masih mendapatkan keuntungan kotor Rp.750.000,- – Rp.1.500.000,- /panen dengan lama pemeliharaan 3 bulan hal ini yang menyebabkan banyaknya pembudidaya yang melakukan investasi dengan penambahan luas lahan tetapi sayangnya pada Tahun 2008 terjadi peningkatan terhadap biaya produksi yang dikeluarkan oleh pembudidaya ikan hal ini disebabkan karena meningkatnya harga benih ikan lele menjadi Rp.200,-/ekor dan harga pakan meningkat 40% yaitu sebesar Rp.7.000,-/kg sehingga dengan hasil produksi yang tetap 500 kg/panen/100m² jika dikalikan dengan harga jual Rp.9.000/kg maka pendapatan dari pembudidaya ikan sebesar Rp.4.500.000,-/panen atau sama dengan biaya produksi yang dikeluarkan oleh pembudidaya. Hal ini yang menyebabkan pembudidaya ikan tidak dapat melunasi pinjaman dikarenakan biaya produksi yang dikeluarkan oleh pembudidaya meningkat sangat drastis.

5.2.4. Indikator Benefit

Menurut Ruky (2001) dalam Mulya (2010:16) menyatakan bahwa indikator benefit adalah manfaat yang dihasilkan dari aktifitas program yang dijalankan, sedangkan menurut Hovland (2007 : 17) menyatakan bahwa indikator benefit adalah respon langsung terhadap proyek/program/lembaga penelitian oleh penerima program dan dalam penelitian ini penulis hanya melihat indikator benefit yang didasarkan dari juklak Ditjen Perikanan Budidaya tentang pelaksanaan program dana penguatan modal TA 2006,

yaitu meliputi pengukuran terhadap perkembangan usaha budidaya perikanan di Kota Metro .

A. Berkembangnya Usaha Budidaya Perikanan di Kota Metro

Untuk melihat keberhasilan indikator benefit untuk kegiatan ini didasarkan dari dokumen UPP dan hasil wawancara kepada Ketua UPP dan Kabid Perikanan Dinas Pertanian Kota Metro.

Menurut Ketua UPP Kota Metro menyatakan bahwa usaha budidaya perikanan di Kota Metro merupakan usaha budidaya air tawar dengan jenis ikan yang diusahakan berupa ikan lele, patin dan gurame. Pada saat awal terbentuknya UPP Kota Metro mempunyai anggota terdiri dari 30 kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) dengan jumlah pembudidaya sebanyak 350 orang dan dengan adanya program dana penguatan modal (DPM) jumlah pembudidaya ikan di Kota Metro sampai dengan tahun 2008 meningkat menjadi 664 orang dengan jumlah Pokdakan sebanyak 51 buah, selain itu usaha budidaya ikan lele ini juga memberikan manfaat bagi penciptaan lapangan pekerjaan.

Tabel 9. Penyerapan Tenaga Kerja

No	Kegiatan	Penyerapan Tenaga Kerja			
		2006	2007	2008	2009
1	Pembudidayaan Ikan	350 orang	475 orang (35,7 %)	664 orang (39,8 %)	664 orang
2	Pemberdayaan Tenaga Pemasaran	10 orang	18 orang (80%)	30 orang (66,7 %)	30 orang (0%)
3	Pengolahan Hasil Perikanan (home Industri)	1 kelompok	2 kelompok	2 kelompok	2 kelompok
4	Pedagang pecel lele	20 buah	45 buah (125 %)	55 buah (22,2 %)	60 buah (9%)
5	Pembuatan Pakan Ikan	-	-	-	2 kelompok

Sumber : Laporan UPP Kota Metro TA 2010

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa usaha budidaya ikan lele di Metro telah memberikan dampak berupa manfaat lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Metro hal ini selaras dengan keterangan dari wawancara dengan Kabid Perikanan Dinas Pertanian Kota Metro yang menyatakan bahwa kegiatan usaha perikanan budidaya lele di Kota Metro di mana selain dari segi kegiatan budidaya mengalami peningkatan produksi juga menciptakan lapangan pekerjaan baru seperti tenaga pemasaran (bakul – bakul kecil) dan juga pekerjaan sampingan bagi ibu – ibu rumah tangga dengan kegiatan pengolahan pengasapan ikan lele.

Perkembangan usaha budidaya lele di Kota Metro terjadi peningkatan produksi perikanan sejak tahun 2007 yang merupakan hasil dari program DPM yang diikuti oleh kenaikan harga jual ikan lele di tingkat pembudidaya dari Rp.5.500 menjadi Rp. 7.500 – Rp.9.000,- dan perkembangan usaha budidaya perikanan di Kota Metro ini secara tidak langsung telah memberikan manfaat bagi terciptanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Metro.

Selain itu berkembangnya usaha perikanan budidaya di Kota Metro ini tidak terlepas dari peran UPP Kota Metro dalam membantu pembudidaya ikan dalam pemasaran hasil produksi perikanan serta dapat mengontrol harga jual ikan sehingga pembudidaya tidak takut untuk berproduksi tinggi.

Hasil penelitian mengenai program dana penguatan modal (DPM) berdasarkan indikator – indikator yang ada dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 10. Hasil Pengukuran Indikator Kegiatan

No	Indikator Pengukuran	Kegiatan	Hasil Penelitian
1	Input	a. Terbentuknya UPP di Kota Metro	<p>Terbentuknya UPP Kota Metro sebagai wadah kelembagaan untuk membantu pembudidaya ikan dan sebagai mitra pemerintah dalam menyalurkan dana penguatan modal (DPM) TA 2006 .</p> <p>UPP terbentuk berdasarkan SK Walikota Metro No.185/KPTS/D.9/2006 pada Tanggal 27 Juli 2006.</p>
		b. Jumlah pokdakan (kelompok pembudidaya ikan)	<p>Dana penguatan modal (DPM) diperuntukkan bagi pembudidaya ikan yang menjalankan usaha budidaya ikan lele minimal selama 2 tahun.</p> <p>Dari jumlah anggota UPP sebanyak 350 orang yang terdiri dari 15 pokdakan hanya 8 kelompok yang menerima DPM dengan jumlah anggota pembudidaya sebanyak 30 orang</p> <p>Proses pengusulan pembudidaya penerima DPM yang berperan adalah UPP sehingga kegiatan ini adalah dari pembudidaya untuk pembudidaya.</p>

(Sambungan Tabel 10)

		c. Jumlah pinjaman yang disalurkan BRI	BRI mencairkan pinjaman dengan agunan dana penguatan modal (DPM) sebesar Rp.90.000.000 untuk 30 pembudidaya ikan. Jumlah dana penguatan modal (DPM) yang disalurkan oleh BRI sebesar Rp. 86.850.000 dari total jumlah DPM yang ada untuk 30 pembudidaya ikan di Kota Metro, hal ini tidak sesuai dengan rencana definitif kerja kelompok (RDKK) walaupun dari segi pengembalian tidak mengalami masalah karena pembudidaya hanya mengembalikan jumlah dana yang diterima. Jumlah yang tidak sesuai ini disebabkan setiap pembudidaya ikan mendapatkan potongan biaya administrasi sebesar Rp.105.000 untuk biaya materai 6 bh dan fotocopi berkas
		d. Jumlah produksi pokdakan sebelum menerima pinjaman	Produksi dan produktifitas awal pembudidaya ikan di Kota Metro sebelum adanya program DPM masih sangat rendah karena tingkat kelulusan hidup (SR) ikan rendah yaitu sebesar 50 – 60 % dan juga adanya keterbatasan dalam segi modal dan pengetahuan mengenai teknik budidaya yang benar.

(sambungan Tabel 10)

2	Output	a. Peranan UPP dalam membantu pembudidaya	<p>Sebagai wadah silaturahmi dan informasi bagi pembudidaya</p> <p>Membantu pemasaran hasil produksi sehingga dapat meningkatkan harga jual ikan di tingkat pembudidaya di mana sebelum adanya UPP harga jual ikan lele ditingkat pembudidaya hanya sebesar Rp.5.500 – Rp.6.000,- namun setelah adanya UPP harga jual ikan lele di tingkat pembudidaya dapat meningkat menjadi Rp.9.000,-.</p> <p>Sebagai perantara antara pembudidaya dan pemerintah khususnya Dinas Perikanan Provinsi dan Kota Metro</p>
		b. Jumlah DPM yang diterima UPP dan pembudidaya secara tepat waktu dan tepat jumlah	<p>Alokasi DPM yang dicairkan ke rekening giro UPP sebesar Rp.90.000.000 pada TA 2006</p> <p>Proses pencairan DPM ke UPP dari KPKN langsung masuk ke rekening giro UPP Kota metro di BRI Metro</p> <p>Proses pencairan DPM ke pembudidaya ikan pada awal desember setelah melakukan akad kredit di BRI</p>

(sambungan Tabel 10)

		c. Jumlah produksi pokdakan setelah menerima pinjaman	<p>Terjadi peningkatan produksi dan produktifitas hasil usaha budidaya ikan lele oleh pembudidaya ikan yang mendapatkan alokasi pinjaman DPM</p> <p>Peranan tenaga pendamping teknologi (TPT) sangat penting dalam memberikan bimbingan teknis budidaya sehingga pembudidaya mendapatkan pengetahuan dalam menurunkan angka kematian ikan sehingga SR dapat meningkat</p> <p>Produktifitas usaha budidaya perikanan dapat diasumsikan dipengaruhi oleh modal, produksi dan tingkat pengetahuan tentang cara budidaya ikan yang benar</p>
3	Outcome	a. Meningkatnya kepercayaan lembaga pembiayaan terhadap usaha budidaya ikan di Kota metro	Dampak dari pelaksanaan program DPM 2006 telah menyebabkan meningkatnya kepercayaan perbankan untuk memberikan pinjaman modal kepada pembudidaya ikan khususnya di Kota Metro.

(sambungan Tabel 10)

		b. Pengembalian dana penguatan modal oleh pembudidaya	Hasil dari penelitian yang didapatkan oleh penulis ternyata jumlah yang dapat dikembalikan oleh pembudidaya ikan di Kota Metro hanya sebesar Rp. 59.048.929 (67,99%) dari total pinjaman Rp.86.850.000,- hal ini disebabkan terjadinya peningkatan biaya produksi pada harga pakan dan benih ikan. Terjadi peningkatan pendapatan pembudidaya ikan lele pada tahun 2007 dengan ditandai bertambahnya investasi dari beberapa pembudidaya ikan penerima DPM. Dari segi perencanaan program jelas tidak tergambar tentang dampak jangka panjang yang terjadi akibat dari pelaksanaan program DPM yaitu dampak kenaikan harga pakan dan benih ikan akibat dari meningkatnya usaha budidaya ikan lele di Kota Metro
4	Benefit	Berkembangnya usaha pembudidayaan ikan lele di Kota Metro	Jumlah pembudidaya ikan dan pokdakan yang ada di Metro meningkat di mana sampai dengan tahun 2010 jumlah anggota pembudidaya ikan yang menjadi anggota UPP Kota Metro sebanyak 664 dan kegiatan ini juga telah memberikan dampak terhadap penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Metro

Sumber : data hasil penelitian